

LAPORAN

2025

KINERJA TRIWULAN 1

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN



**Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia**

LEMBAR PENGESAHAN



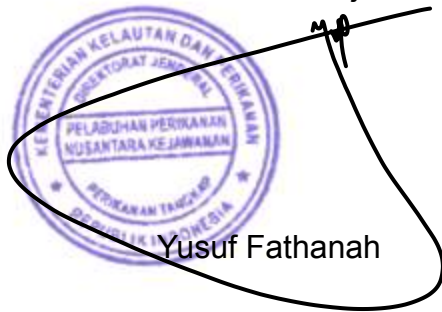
LAPORAN KINERJA (LKj)

TRIWULAN I TAHUN 2025 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Cirebon, 15 April 2025

Disetujui oleh:

Penanggung Jawab,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawanan



Yusuf Fathanah

Disusun oleh:

Ketua Tim,
Kepala Subbagian Umum



Mohamad Yusuf Santoso

KATA PENGANTAR

Sejak Tahun 2013, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah memanfaatkan *Balanced Score Card* sebagai tools dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan BSC, unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan mengacu pada RPJMN 2025 – 2029, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Triwulan I Tahun 2025 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*base line*) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan di Tahun 2025, namun akan konsisten hingga akhir RPJMN di Tahun 2029.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 ini disertai dengan data dukung capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja ini.

Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Triwulan I Tahun 2025.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum
- 1.3. Tugas dan Fungsi
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. SDM PPN Kejawanan
- 1.6. Sistematika Penyajian

2. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap
- 2.2. Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025
- 2.3. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

3. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Akuntabilitas Keuangan

4. PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja TA 2025
- SK Tim Penyusun Laporan Kinerja TA 2025
- Rencana Aksi Tahun 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dengan dukungan anggaran Rp74.398.980.000,- yang terealisasi sebesar Rp4.439.975.154,- atau 5,97% dari total pagu Tahun 2025. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 115,25%. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 1).



Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh nilai target Tahun 2025 yang mencapai angka 100% atau lebih adalah semua indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja sebagai berikut :

1. IK1 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)
2. IK2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)
3. IK4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
4. IK7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
5. IK8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
6. IK11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
7. IK14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
8. IK18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Untuk 10 (sepuluh) Indikator Kinerja target yang ditetapkan menggunakan metode perhitungan targetnya adalah semesteran atau tahunan sehingga capaian/realisasi indikator tersebut diperoleh pada semester atau akhir tahun, adapun indikator tersebut antara lain :

9. IK3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
10. IK5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
11. IK6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
12. IK9 – Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
13. IK10 – Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
14. IK12 – Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
15. IK13 – Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)
16. IK15 – Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
17. IK16 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
18. IK17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome).

BAB I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggung jawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan disusun oleh setiap unit kerja yang menyusun perjanjian kinerja yakni dengan menyajikan informasi tentang; (1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) pengukuran kinerja, dan (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program dan kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan setiap tahunnya telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana format yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menggambarkan kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

1.2. Gambaran Umum

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentra kegiatan perikanan terutama yang berada di wilayah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

Selain itu, Pelabuhan Perikanan juga merupakan titik temu (terminal point) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi darat.

Pembangunan PPN Kejawanan Cirebon dirintis pada tahun 1976 tetapi baru intensif pelaksanaan pembangunannya mulai tahun anggaran 1994/1995. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia, di mana sumber anggaran berasal dari APBN, APBD, ZEEI dan OECF. Dalam pelaksanaan pembangunannya diprioritaskan pada Fasilitas Pokok seperti Penahan Gelombang, Dermaga, Kolam dan Alur Pelayaran, Rambu Navigasi, Jalan Masuk dan Jalan Komplek, TPI dan lain-lainnya. Setelah melewati tiga tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 PPN Kejawanan pada bulan Mei 1997 dioperasikan dengan status Uji Coba yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak R. Nuriana, walaupun dengan fasilitas yang masih minim.

Pengembangan PPN Kejawanan Cirebon diupayakan untuk mewujudkan harapan, menjadikan Kota Cirebon sebagai Kota Udang, Pusat kegiatan perikanan di Pantai Utara bagian Timur Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dimungkinkan karena Kota Cirebon cukup mempunyai potensi untuk mewujudkan harapan tersebut, baik dilihat dari segi potensi perikanan maupun dari segi pendukung lainnya, seperti sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan, perhubungan/transportasi, telekomunikasi, listrik, Air PDAM, sumber daya manusia dan lain-lain.



Gambar 2. Master Plan PPN Kejawanan

1.3. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;

9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan merupakan Eselon III meliputi posisi jabatan sebagai berikut :

1. Subbagian Umum, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan,

dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

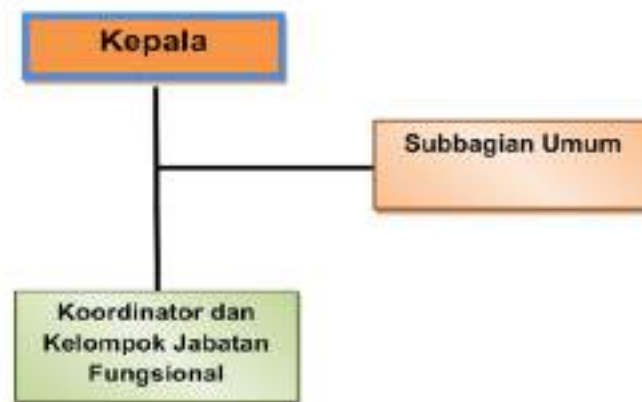
2. Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan bertanggung jawab untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
3. Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan Log Book, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha bertanggungjawab untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa seperti

sewa alat berat, sewa lahan, jasa kebersihan, pas harian/berlangganan, penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha;

5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan

fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terdiri dari Pranata Komputer (Muda), Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Pertama), Pranata Keuangan APBN (Mahir), Analis Kepegawaian, Pranata Humas (Terampil), Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) serta Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T).

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN



Gambar 3. Struktur Organisasi PPN Kejawanan

1.5. SDM PPN KEJAWANAN

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di dukung oleh 71 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 44 orang, PPPK sebanyak 19 orang dan Pramubakti sebanyak 8 orang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset

untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi Pegawai Pelabuhan Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	1	1
2.	Kepala Subbagian Umum	-	-	1	-	1
	- Dukungan Manajerial	-	-	3	1	4
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	8	2	-	10
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	1
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	1	2	-	3
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	1
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	3	-	3
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	6	-	6
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	-	-	1	-	1
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	3	-	-	3
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	-	-	2	-	2
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	-	-	1	-	1
	- Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	1
	- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Pertama)	-	-	1	-	1
	- Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Pelaksana/Terampil)	-	1	-	-	1
	- Arsiparis (Pelaksana/Terampil)	-	1	-	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Muda)	-	-	1	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Pertama)	-	-	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)					
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	7	-	7
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	7	-	-	7
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	2	-	-	2
	- Arsiparis Ahli Pertama	-	-	1	-	1
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	-	1	-	1
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	1	-	1
8.	Pegawai Pramubakti	8	-	-	-	8
Jumlah		8	23	38	2	71

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pelabuhan Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	1	-	-	-	-	1
2.	Kepala Subbagian Umum	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Dukungan Manajeril	-	1	1	-	1	-	-	3
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	9	-	-	10
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	1	-	2	-	-	3
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	2	-	1	-	-	3
6.	Jabatan Fungsional Tertentu								
	- Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	6	-	-	-	-	6
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	-	-	1	2	-	-	3
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	-	-	2	-	-	-	-	2
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Analisis Sumber Daya Aparatur Ahli (Pertama)	-	-	1	-	-	-	-	1
	-Analisis Sumber Daya Aparatur (Pelaksa a/Terampil)	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Arsiparis (Pelaksana/Terampil)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Pertama)	-	-	1	-	-	-	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)								
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	8	-	1	-	-	9
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	-	-	-	6	-	-	6
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	-	-	2	-	-	-	2
	- Arsiparis Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
8.	Pegawai Pramubakti	-	-	2	-	6	-	-	8
Jumlah		-	1	38	4	28	-	-	71

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1.	Kepala Pelabuhan	1	1	-
2.	Kepala Subbagian Umum	1	1	-
	- Dukungan Manajerial	4	4	-
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	1	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	10	10	-
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	1	1	-
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	3	3	-
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	1	1	-
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	3	3	-
6.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	- Pranata Komputer (Muda)	1	1	-
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	6	4	2
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	3	3	-
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	1	1	-
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	2	1	1
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	1	-	1
	- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli (Pertama)	1	-	1
	- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Pelaksana/Terampil)	1	-	1
	-Arsiparis (Pelaksana/Terampil)	1	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Muda)	1	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Pertama)	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	7	5	2
	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	7	6	1
	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	2	2	-
	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	-
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1	-	1
	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	-
8.	Pegawai Pramubakti	8	7	1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin		71	56	15
Persentase Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin		100,00	79,45	20,55

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Target Tahunan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:



1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Bab ini disajikan ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

2. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan informasi umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sistematika Laporan

3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2025.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan capaian kinerja organisasi (membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi, analisa penyebab

kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan) serta realisasi anggaran.

5. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

6. LAMPIRAN

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap

- Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Visi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Partisipatif, Berkelanjutan dan Mensejahterakan Nelayan”** untuk mewujudkan **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.
- Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.
- Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Menjabarkan misi DJPT, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:
 1. Menjamin kelestarian sumber daya ikan melalui penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pengawasan berbasis wilayah pengelolaan;
 2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan melalui pemanfaatan teknologi, modernisasi armada, dan integrasi sistem logistik hasil tangkapan;
 3. Mengembangkan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai simpul layanan terpadu dan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan;
 4. Memperkuat kelembagaan, perlindungan, dan pemberdayaan nelayan, termasuk nelayan kecil, perempuan, dan pemuda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing;
 5. Meningkatkan tata kelola perikanan tangkap yang transparan dan akuntabel, melalui penguatan regulasi, perizinan, pemantauan, serta sistem data dan informasi perikanan.

VISI DAN MISI PPN KEJAWANAN

“Terwujudnya Pusat Usaha Perikanan Yang Berdaya Saing dan Terintegrasi Bertaraf Internasional”

Sebagai “Pusat Usaha Perikanan” artinya bahwa wilayah PPN Kejawanan merupakan pusat bagi kegiatan perikanan dari hulu (perikanan tangkap) sampai hilir (pengolahan dan pemasaran ikan).

“Yang Berdaya Saing” artinya produk perikanan di PPN Kejawanan mempunyai mutu yang dapat bersaing pada pasar domestik, dan internasional.

“Dan Terintegrasi” artinya seluruh aktivitas usaha perikanan saling terkait dan mendukung (mewujudkan KKP mini) termasuk aktivitas pendukung non perikanan untuk mengoptimalkan potensi PPN Kejawanan.

“Bertaraf Internasional” artinya seluruh aktivitas dan usaha di PPN Kejawanan memiliki standar Internasional.

2.2. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dirumuskan dalam dokumen perjanjian kinerja yang berisi penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU merupakan tolak ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang diturunkan dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	6.548, 82
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	5.500
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	87
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	90
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	32
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	575
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	71,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	88,5

Adapun pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pelabuan Perikanan Nusantara Kejawanen untuk Tahun 2025 dapat dikomposisikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU/TARGET	REALISASI	%
1.	2338	Pengelolaan Pelabuan Perikanan	59.521.371.000	73.314.239	0,12
	999.999	Output Cadangan	2.425.445.000	-	-
	ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun (Rekomendasi Kebijakan)	50.000.000	-	-
	BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (Lembaga)	695.926.000	62.101.926	8,92
	RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I (Unit)	56.350.000.000	11.212.313	0,02
2.	2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	10.889.000	-	-
	QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	10.889.000	-	-
3.	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.866.720.000	4.366.660.915	29,37
	CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	858.055.000	-	-
	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	25.000.000	-	-
	EBA.963	Layanan Data dan Informasi (Layanan)	15.000.000	2.140.000	14,27
	EBA.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	12.875.765.000	4.356.989.425	33,84
	EBB.951	Layanan Sarana Internal (Unit)	640.000.000	-	-
	EBB.971	Layanan Prasarana Internal (Unit)	100.000.000	-	-
	EBC.954	Layanan Manajemen SDM (Layanan)	25.000.000	-	-
	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Layanan)	134.000.000	-	-
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Layanan)	109.000.000	7.531.490	6,91
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)	84.900.000	-	-

2.3. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU Perspektif *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang di sandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga didapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran dibawah ini, sebagai berikut ini :

Tabel 6. Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2025

Matriks Capaian Triwulan I
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.)	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TAHUN 2024												Keterangan
								Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
								Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. juta)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Pengadaan dan Rehabilitasi sarana perikanan (2342.EB5.971.051)	100.000.000,00	6.548,82	Rp. juta	1.748,82	2.287,80	129,64%	3.118,82			3.118,82			6.348,82			Tercapai
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat	2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (2342.EB5.963.051)	15.000.000,00	5.500	Ton	850		119,69%	1.800			3.400			5.500			Tercapai
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab	3. Persentase permohonan pengurusan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengurusan di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.054)	495.926.000,00	100	Persen											100		Belum ada capaian
		4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Money RPP dalam rangka mendukung PNBP pasca dan PPT	-	87	Nilai	87	86,30	110,72%	87			87			87			Tercapai
		5. Tingkat Pelayanan Kearahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Tim Kerja Kearahbandaran	Laporan data logbook perangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (2341.QKB.001)	10.889.000,00	90	Persen											90		Belum ada capaian
		6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun (2338.AB8.001)	10.000.000,00	32	Persen											32		Belum ada capaian
				Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - RPP IFM 1 (2338.EBQ.001)	56.350.000.000,00															
	7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)		Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Pelaksanaan KS di Pelabuhan Perikanan	-	30,10	Nilai	10,10	88,60	294,37%	30,30			10,10			30,30			Tercapai

4	Pengelompokan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Kapal Perikanan lain daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Tim Kerja Kesyahbandaran	Pemeriksaan kelaikan kapal perikanan	-	57	Kapal	320	76	336,32%	330			330		57	Tercapai
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Belanja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	Tim Kerja Kesyahbandaran	Sosialisasi persyaratan pengawakan kapal perikanan	-	0,26	Nilai				0,26					0,26	Belum ada capaian
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (2342 EBA.960.052.A)	25.000.000,00	75,50	Nilai									75,50	Belum ada capaian
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Diantarakan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)		Kegiatan perjalanan dalam rangka pelaporan (2342 EBD.955.054.B)	82.840.000,00	81	Persen	81	100	111,67%	81			81	Tercapai		
		12	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)		Layanan Pemantauan dan Evaluasi (2342 EBD.953)	109.000.000,00	88	Nilai								88	Belum ada capaian	
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)		Layanan Manajemen SDM (2342 EBC.954)	25.000.000,00	87	Indeks				87				87	Belum ada capaian	
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (2342 CAN.955)	838.050.000,00	76	Persen	76	100	131,58%	76			76	Tercapai		
		Layanan Sarana Internal (2342 EBB.951)			640.000.000,00													
		15	Persentase Pengelompokan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)		Kegiatan Laporan Keuangan dan BMN (2342 EBD.955.054.A)	2.060.000,00	81	Persen								81	Belum ada capaian	
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)		Layanan Perkantoran (2342 EBA.994)	12.875.765.000,00	91	Nilai				91					91	Belum ada capaian
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)		Layanan Perencanaan dan Penganggaran (2342 ERD.952)	134.000.000,00	71,5	Nilai								71,5	Belum ada capaian	

	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelayanan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada para pengguna jasa mengenai jenis layanan yang tersedia serta ketentuan tarif yang berlaku	-	88,50	Nilai	88,50	94,79	100,00%	88,50				88,50		88,50			Terapan
--	----	--	--	---	-------	-------	-------	-------	---------	-------	--	--	--	-------	--	-------	--	--	---------

Cirebon, 15 April 2025

 getahut.
 YUSUF FATHANAH
 Kepala PPN Kejawanan

BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap melalui evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2025 diukur melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut :

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s.d Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	Juta Rupiah	6.548,82	1.748,82	2.267,10	120
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	Ton	5.500	850	1.355,68	120
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab	3 Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	100	-	-	-
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	87	87	96,33	110,72
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	90	-	-	-
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	32	-	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)	Nilai	30,10	30,10	88,60	120
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan	8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Kapal	575	520	556	106,92
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	Nilai	0,26	-	-	-
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)	Nilai	75,50	-	-	-
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)	Persen	85	85	100	117,65
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)	Nilai	88	-	-	-
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Indeks)	Indeks	87	-	-	-
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)	Persen	76	76	100	120
		15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)	Persen	81	-	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	92	-	-	-
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	71,5	-	-	-
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	88,50	88,50	94,79	107,11

Adapun pembahasan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

3. 1. 1. Sasaran Kegiatan 1 - Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

IKU 1 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Juta Rupiah)

Indikator Penerimaan PNBP merupakan indikator penerimaan negara bukan pajak pada PPN Kejawanan yang dicapai tahun berjalan dalam sektor Perikanan Tangkap. PNBP yang dikelola oleh PPN Kejawanan berupa PNBP yang berasal dari Sumber Daya Alam/SDA dan non SDA. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Kejawanan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan.

Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari pencapaian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh s.d Triwulan I Tahun 2025. Capaiannya berupa nilai realisasi nilai PNBP fungsional dan umum sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (kumulatif).

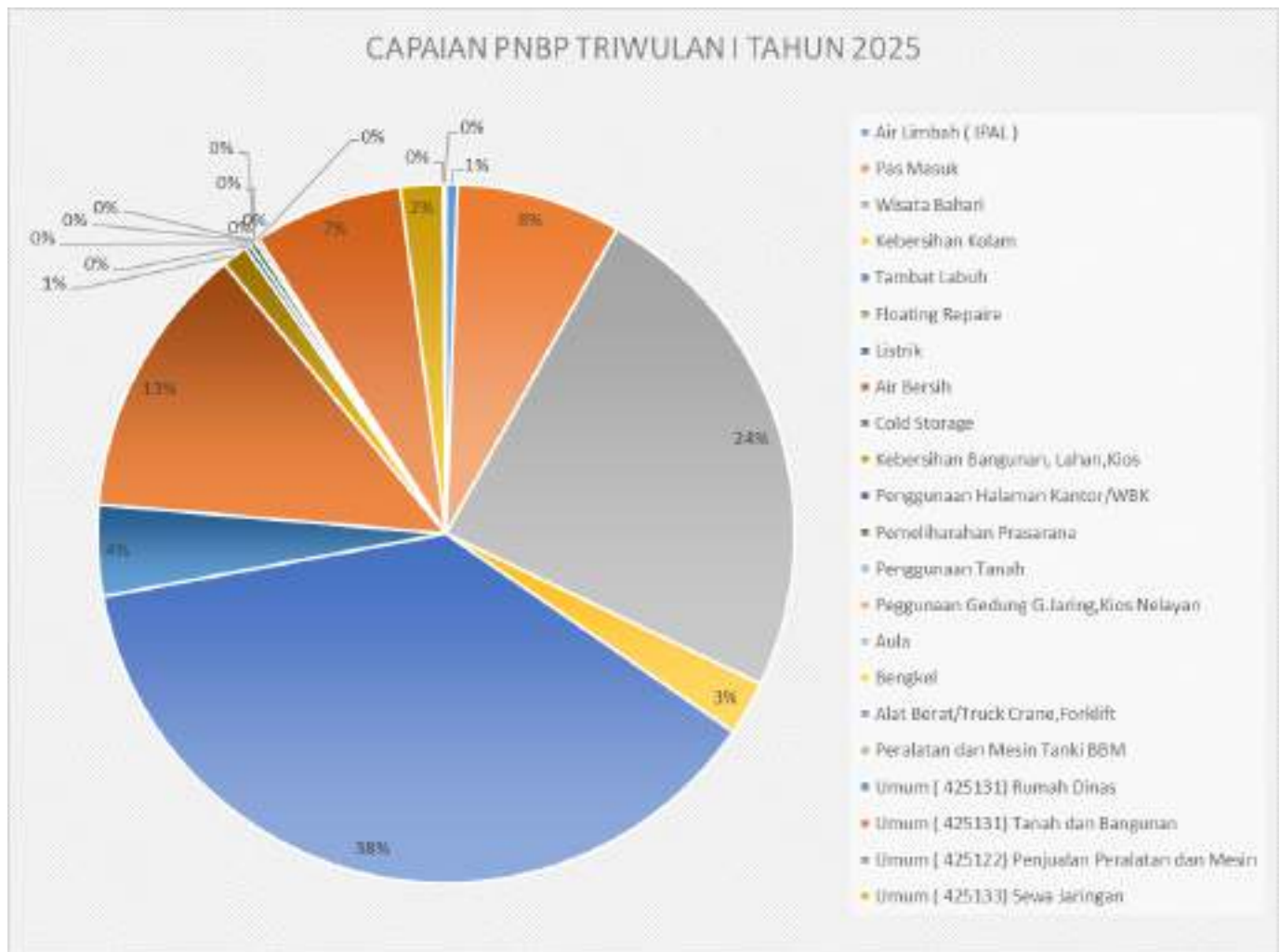
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawan” Triwulan I Tahun 2025

SK 1 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan											
IK 1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawan											
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawan		
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
1.369,45	1.019,10	814,95	2.320,51	2.932,18	6.548,82	1.748,82	2.267,1	159,49%	-	-	

a. Target dan Realisasi

Sampai dengan Triwulan I 2025, Nilai PNBP di PPN Kejawan tercapai sebesar Rp2.267,1 juta atau persentase capaiannya sebesar 159,49%% dari target Triwulan I Tahun 2025.

Capaian tersebut diperoleh dari Air Limbah, Pas Masuk, Pas Wisata Bahari, Kebersihan Kolam, Tambat Labuh, Floating Repair, Listrik, Pengadaan Air, Kebersihan dan Pemeliharaan Lahan, Penggunaan Tanah dan Kawasan, Tambat Labuh dan Floating Repair, Kios Nelayan, Aula, serta penggunaan alat transportasi.



Nilai PNBP tertinggi pada pelayanan tambat labuh sebesar Rp743.168.267,- atau sebesar 38% dari total PNBP pada Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 9. Rincian Nilai PNBP Non SDA di PPN Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

NO.	Bulan	Nilai Penerimaan PNBP Non SDA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Juta Rupiah)
1.	Januari	627.038.681
2.	Februari	707.475.400
3.	Maret	932.580.934
Total		2.267.095.015

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:
dibandingkan Tahun 2020 hingga Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 65,55% - 178,20%. PNBP pada triwulan I Tahun 2025 didukung oleh pelayanan tambat labuh dan meningkatnya pengunjung Wisata Bahari Kejawanan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA Triwulan I Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target (Rp.Juta)	Realisasi (Rp.Juta)	Persentase (%)	Target (Rp.Juta)	Realisasi (Rp.Juta)	Persentase (%)
6.548,82	2.267,10	34,62	535,05	284,6	53,19

Capaian indikator kinerja "Penerimaan PNBP Non SDA" bila dibandingkan dengan PPN Pekalongan, capaian di PPN Kejawanan lebih besar dengan realisasi Rp2.267.095.015,-.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian Nilai PNBP di PPN Kejawanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diperoleh dari Air Limbah, Pas Masuk, Pas Wisata Bahari, Kebersihan Kolam, Listrik, Pengadaan Air, Kebersihan dan Pemeliharaan Lahan, Penggunaan Tanah dan Kawasan, Tambat Labuh dan Floating Repair, Kios Nelayan, Aula, serta penggunaan transportasi (Alat Berat/Truck Crane, Forklift).

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian PNBP di PPN Kejawanan adalah perubahan cuaca dan tren penangkapan. Hal tersebut dapat mempengaruhi dalam pencapaian PNBP khususnya untuk pelayanan tambat labuh, floating repair dan kebersihan kolam.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP di PPN Kejawanan” Tahun 2025 yaitu dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki serta meningkatkan fasilitas layanan di PPN Kejawanan.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Penerimaan PNBP di PPN Kejawanan	34,62%	100.000.000	-	34.618.450	34.618.450
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				34,62%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{98,20\%}{20} \times 50 \right)$				136,55%	

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat realisasi anggaran dengan efisiensi sebesar 34,62% dan nilai efisiensi sebesar 136,55%.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 1 – Nilai PNBP di PPN Kejawan, didukung oleh 24 (dua puluh empat) orang SDM. Dengan pelayanan jasa yang menghasilkan PNBP ada 13 (tiga belas) pelayanan. Terdapat SDM yang merangkap dalam pelaksanaan pelayanan jasa. Petugas pas masuk harian ada 7 (tujuh) orang, yang bertugas dari pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB. Untuk petugas pelayanan jasa air 1 (satu) orang dan listrik 1 (satu) orang, petugas pemanfaatan sewa BMN 2 (dua) orang, petugas pelayanan penggunaan kendaraan 1 (dua) orang, petugas pelayanan jasa tambat labuh 1 (satu) orang, petugas pas harian wisata 9 (sembilan) orang, petugas pelayanan penggunaan halaman wisata bahari 1 (satu) orang, Petugas pengolahan air limbah 1 (satu) orang, Petugas pelayanan penggunaan ruang pertemuan 1 (satu) orang, Petugas penggunaan kawasan 1 (satu) orang.

Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh adanya aplikasi Sistem Jasa Kepelabuhanan (SIJAKA) yang telah terintegrasi dengan aplikasi teman SPB dan Simponi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran tambat labuh.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP di PPN Kejawan” yaitu program pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di Pelabuhan Perikanan yang meliputi kegiatan:

- Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I terkait dengan pencapaian indikator “Penerimaan PNBP di PPN Kejawan” yaitu koordinasi terkait perizinan, sosialisasi perusahaan di pelabuhan perikanan, monitoring dan evaluasi penggunaan tanah dan bangunan, serta peningkatan fasilitas untuk menunjang kegiatan di Wisata Bahari Kejawan.

3. 1. 2. Sasaran Kegiatan 2 - Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan meningkat

IKU 2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Ton)

Indikator Kinerja Utama “Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan” merupakan hasil perhitungan dari jumlah volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan serta pelabuhan perikanan selama triwulan pada tahun berjalan. Realisasi capaian IKU ini dilaporkan secara berkala setiap triwulan. Capaian s/d triwulan I Tahun 2025 adalah sebanyak 1.355,68 Ton atau sebesar 24,65% dari total target Tahun 2025 sebesar 5.500 ton dan 159,50% dari target Triwulan I Tahun 2025 sebesar 850 ton.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja “Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025

SK 2 Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat										
IK 2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
680,44	993,09	541	528,52	879,92	5.500	850	1.355,68	159,50	-	-

a. Target dan Realisasi

Dari target Tahun triwulan I tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 850 ton, jumlah produksi perikanan tangkap UPT PPN Kejawanan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 tercapai sebesar 1.355,68 ton atau persentase capaiannya 159,50%. Adapun jumlah produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan setiap bulannya sebagai berikut :

Tabel 13. Perhitungan Akumulatif Untuk Target dan Realisasi IKU Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

NO.	Bulan	Volume Produksi Perikanan Tangkap PPN Kejawanan (Ton)
1.	Januari	455,63
2.	Februari	181,75
3.	Maret	718,30
Total		1.355,68

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel volume produksi di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:
 Realisasi volume produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan setiap tahunnya mengalami pergerakan yang cenderung fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah kapal domisili yang mengalami perubahan fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, trend penangkapan ikan yang berubah-ubah setiap tahunnya, durasi penangkapan ikan yang berubah, perubahan iklim yang semakin tidak menentu, dll. Faktor - faktor tersebut dapat mempengaruhi jumlah trip suatu kapal ketika beroperasi melakukan penangkapan ikan di *fishing ground*. Selanjutnya, dalam kurun waktu yang sama, volume produksi juga mengalami perubahan yang sifatnya fluktuatif.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target nasional

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Volume produksi perikanan tangkap s.d Triwulan I Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Persentase (%)	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Persentase (%)
5.500	1.355,68	24,65	10.000	2.567,44	25,67

Jika dibandingkan dengan capaian volume produksi perikanan tangkap PPN Pekalongan, capaian volume produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan jauh lebih kecil dengan selisih 1.211,76 ton. Hal ini dapat dimaklumi mengingat PPN Pekalongan memiliki jumlah kapal domisili yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan PPN Kejawanan. Hal tersebut tentunya sejalan dengan volume produksi yang besar pula.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Meskipun target volume produksi perikanan tangkap pada Triwulan I Tahun 2025 tercapai dan bahkan melampaui dari target yang telah ditentukan, namun masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kapal domisili yang fluktuatif bahkan cenderung menurun, trend musim ikan yang semakin tidak terkirakan, trend pelayaran yang semakin panjang, kenaikan harga BBM, dan faktor alam/cuaca serta faktor faktor tidak terduga lainnya. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik, PPN Kejawanan melakukan beberapa inovasi diantaranya melaksanakan pencatatan produksi secara digital, efisien dan transparan melalui aplikasi bantu pencatatan. PPN Kejawanan juga memaksimalkan pemanfaatan timbangan digital yang turut membantu kinerja petugas di lapangan.

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu hambatan yang sifatnya tidak terduga dan tidak bisa dihindari seperti alam dan cuaca, trend penangkapan yang semakin lama karena semakin sulit mendapatkan ikan, musim ikan yang semakin tidak terprediksi, dll.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki seperti timbangan digital, fasilitas penunjang kegiatan pembongkaran ikan (palet timbangan, selasar portabel, dll) aplikasi bantu pencatatan pendaratan ikan, sumber daya manusia, dll.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanen” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 15. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanen Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Volume produksi perikanan tangkap	24,65%	15.000.000	2.140.000	3.697.309	1.557.309
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				10,38%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{34,88\%}{20} \times 50 \right)$				75,96%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanen sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp2.140.000,00 atau 14,27% dari total anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 10,38% dan nilai efisiensi sebesar 75,96%.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Kejawanen, didukung oleh 8 (delapan) orang petugas pendataan produksi ikan dan 5 (dua) orang validator produksi. Kegiatan pendaratan ikan di PPN Kejawanen relatif cepat dan kondusif sehingga tidak ada kegiatan pendaratan ikan yang menghabiskan waktu sampai 24 jam/sampai diberlakukan sistem shift pegawai.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja “Volume Produksi Perikanan Tangkap” yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan – pengelolaan pelabuhan perikanan yang meliputi kegiatan:

- Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pencapaian indikator “Volume Produksi Perikanan Tangkap” yaitu koordinasi dengan instansi terkait perihal validasi data statistik perikanan tangkap.

- Memastikan sarana dan prasarana pendukung seperti timbangan digital, palet, selasar, dall berfungsi secara optimal.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait proses pendataan volume produksi ikan oleh petugas.

3. 1. 3. Sasaran Kegiatan 3 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen yang optimal dan bertanggung jawab

IKU 3 - Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen (Persen)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa lahan/ gedung/ bangunan yang dalam prosesnya diperlukan analisa atau evaluasi permohonan pengusahaan.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja “Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen” Triwulan I Tahun 2025

SK 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen yang optimal dan bertanggung jawab									
IK 3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanen	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	-	-	100	-	-	-	-	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2020 hingga Tahun 2022 belum terdapat indikator kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Sementara di Tahun 2023 dan 2024, IKU tersebut periode pelaporannya bersifat tahunan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi Triwulan I Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
100	-	-	100	-	-

Capaian indikator kinerja “Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan realisasi indeks kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi yang mencapai target triwulan I Tahun 2025, tidak lepas dari komitmen dan kerja keras PPN Kejawanan, khususnya Petugas Pelayanan Pemanfaatan sewa BMN dalam memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan. Peran serta dari pengguna jasa yang kooperatif dalam menyampaikan kelengkapan berkas permohonan juga menjadi faktor penunjang keberhasilan sehingga proses analisis menjadi lebih cepat.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 18. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan	-	695.926.000	62.101.926	-	- 62.101.926
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-8,92%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{2,28\%}{20} \times 50 \right)$				27,69%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp62.101.926,00 atau 8,92% dari total anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi -8,92% dan nilai efisiensi sebesar 27,69%.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja 3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi, didukung oleh 2 (dua) orang petugas Petugas Pelayanan Pemanfaatan Sewa BMN yang merangkap jabatan fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan Penata Perizinan Pertama, sehingga pemanfaatan SDM menjadi efisien.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Mengacu pada analisis keberhasilan atau kegagalan, beberapa program / kegiatan dapat menjadi solusi yang dapat berdampak peningkatan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Permohonan yang dianalisis dan atau evaluasi yaitu Pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan.

IKU 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen (Nilai)

Indikator kinerja ini merupakan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan perikanan sesuai keputusan Dirjen No.20/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sesuai dengan perjanjian kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen” di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen ini dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen melalui aplikasi PIPP. Penilaian terhadap terpenuhinya penyediaan data Operasional Pelabuhan dengan indikator sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jenis data yang harus diinput melalui aplikasi PIPP.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen” Triwulan I Tahun 2025

SK 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen yang optimal dan bertanggung jawab										
IK 4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanen		
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
82	88,25	85,33	89,58	88,67	87	87	96,33	110,72	-	-	

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian tingkat kinerja pelabuhan Triwulan I Tahun 2025 yaitu 96,33 atau 110,72% dari target Tahun 2025.

Tabel 20. Realisasi IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen Tahun 2025

NO.	Bulan	Nilai Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan (EVKIN)
1.	Januari	96,75
2.	Februari	94,5
3.	Maret	97,75
Triwulan I Tahun 2025		96,33

Tabel 21. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan Januari Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN
PPN. Kejawanan

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	January		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	14,00	4,00	Antara 10 - 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SIPI	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	242,52	4,00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	100,00	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	2.126,00	3,00	Antara 1500 - 2250 GT
9	Panjang Dermaga	m	2.018,00	4,00	Diatas 150m
10	Kedalaman Kolam	cm	300,00	4,00	Diatas 3m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemecahan & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	15,02	4,00	Diatas 10 ha
14	Pelayanan Tambak Labuh	GT	328,00	5,00	Lebih dari 30 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	14,65	3,75	Antara 5 - 30 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	34,00	5,00	lebih dari 12 unit
17	STBLKK	%	113,76	5,00	Kapal yang masuk 100%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	11,00	4,00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	12,00	4,00	Diatas 4 kali
20	Polikarsanan KS	Hasil	Baik	4,00	---
21	Penyuluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyuluran Es (kapal)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyuluran BBM (kapal)	%	100,00	5,00	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WIDPP	Unit	17,00	4,00	Diatas 15 unit
25	Pemanfaatan lahan Pelabuhan	%	735,30	3,00	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.883,00	3,00	Lebih dari 1500 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	1 (GT)	2,00	---
Jumlah				95,75	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

Tabel 22. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan Februari Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN
PPN. Kejawanan

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Februari		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Frekuensi Pengiriman Data (RPP)	Kali	15,00	4,00	Antara 10 - 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	—
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	—
4	SHI	Ya/Tidak	Ya	2,00	—
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	341,57	4,00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	100,00	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	—
8	Kapasitas Daya Tampung Kalan Pelabuhan	GT	984,00	2,00	Antara 750 - 1500 GT
9	Panjang Dermaga	m	2.038,00	4,00	Diatas 150m
10	Kedalaman Kalan	m	300,00	4,00	Diatas 1m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	—
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	—
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	18,62	4,00	Diatas 10 ha
14	Pelayanan Tambak Laku	GT	199,00	5,00	Lebih dari 10 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	6,32	3,75	Antara 5 - 30 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	21,00	5,00	Lebih dari 12 unit
17	STBKK	%	95,23	3,75	Kapal yang masuk antara 75 - 95%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	11,00	4,00	Diatas 1 kali
19	Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perekarsentaraan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	15,00	4,00	Diatas 4 kali
20	Pelaksanaan KS	Hasil	Baik	4,00	—
21	Penyuluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyuluran Es (kapal)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyuluran BBM (kapal)	%	100,00	5,00	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Perikanan di WROPP	Unit	17,00	4,00	Diatas 15 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	735,38	3,00	Sangat Optimal (50 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.849,57	3,00	Lebih dari 1500 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	1 (88)	2,00	—
	Jumlah			94,5	
	Kesimpulan dan Rekomendasi			SANGAT BAIK	

Tabel 23. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan Maret Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN
PPN, Kojawanan

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Maret		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Frekuensi Pengiriman Data (PDP)	Kali	22,00	5,00	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SHT	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	347,92	4,00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	300,00	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kalan Pelabuhan	GT	2.211,00	3,00	Antara 1590 - 2250 GT
9	Panjang Dermaga	m	2.018,00	4,00	Diatas 150m
10	Kedalaman Kalam	cm	300,00	4,00	Diatas 3m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	15,02	4,00	Diatas 10 ha
14	Pelayanan Tambak Lobak	GT	214,00	5,00	Lebih dari 30 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	23,08	3,75	Antara 5 - 30 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	45,00	5,00	lebih dari 12 unit
17	STBUK	%	113,11	5,00	Kapal yang masuk 100%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	16,00	4,00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Penkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	7,00	4,00	Diatas 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4,00	---
21	Penyediaan Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyediaan Es (kapal)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyediaan BBM (kapal)	%	100,00	5,00	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	17,00	4,00	Diatas 15 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	735,30	3,00	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.906,24	3,00	Lebih dari 1500 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	1 (65)	2,00	---
Jumlah				97,75	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 cenderung mengalami periode yang fluktuatif. sempat mengalami tren positif di tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan di tahun berikutnya pada periode yang sama meskipun penurunan yang terjadi tidak signifikan, selanjutnya selalu mengalami tren positif. Realisasi terhadap capaian indikator kinerja mengalami kenaikan pada tahun 2025. Kondisi demikian dapat diakibatkan oleh banyak faktor mengingat evaluasi kinerja dipengaruhi oleh 27 kriteria

penilaian, seperti aktivitas kedatangan dan keberangkatan kapal yang setiap tahun mengalami pasang surut, volume produksi harian, dll.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
87	96,33	110,72	87	97,17	115,68

Capaian indikator kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan” di PPN Kejawanan tercatat sebesar 96,33 dari target sebesar 87. jika dibandingkan, capaian tersebut lebih rendah dari PPN Pekalongan yakni sebesar 97,17 dari besaran target pada periode yang sama. Hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah frekuensi kunjungan kapal.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Tahun 2025, indikator kinerja tingkat operasional pelabuhan telah mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Penilaian evaluasi kinerja sangat tergantung dari kegiatan operasional yang telah dilaksanakan serta keaktifan operator PIPP dalam memasukkan data operasional, baik secara harian maupun bulanan melalui aplikasi PIPP. Keberhasilan atau kegagalan penilaian evaluasi kinerja terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kriteria yang merupakan kegiatan operasional Pelabuhan di PPN Kejawanan, yaitu :

1. Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)
2. E-Logbook
3. Aplikasi SPB Online
4. SHTI
5. Realisasi Penyerapan Anggaran

6. Pendapatan Pelabuhan
7. Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan
8. Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan
9. Panjang Dermaga
10. Kedalaman Kolam
11. Sarana Perbaikan (Docking, Bengkel)
12. Kelengkapan Fasilitas Pemasaran dan Distribusi Ikan
13. Ketersediaan Lahan Pelabuhan
14. Pelayanan Tambat Labuh
15. Produksi Perikanan
16. Frekuensi Kunjungan Kapal
17. STBLKK
18. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
19. Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi
20. Pelaksanaan K5
21. Penyaluran Air Bersih (Kapal dan Industri Pengolahan)
22. Penyaluran Es (kapal)
23. Penyaluran BBM (kapal)
24. Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP
25. Pemanfaatan Lahan Pelabuhan
26. Penyerapan Tenaga Kerja
27. Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan

Tercapainya target juga didukung oleh adanya kontribusi dan komitmen dari setiap kelompok yang melakukan tugasnya, terpeliharanya manfaat fasilitas fungsional dan pokok Pelabuhan perikanan, tersedianya kualifikasi SDM pegawai yang sesuai fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan pada Pelabuhan perikanan, dan semakin tumbuh dan berkembangnya stakeholder dalam tata niaga perikanan, serta keaktifan operator PIPP.

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain beberapa kriteria bergantung pada aktivitas yang terjadi di pelabuhan perikanan, seperti volume produksi, STBLKK, frekuensi kunjungan kapal, dan tambat labuh dimana kriteria kriteria tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor faktor yang tidak dapat diprediksi, seperti faktor cuaca/alam serta trend dan musim penangkapan ikan.

Faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain komitmen dan kesadaran masing-masing petugas dalam hal pemenuhan kriteria evaluasi kinerja.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu melakukan penambahan sumber daya manusia agar proses pemenuhan kriteria tidak hanya bergantung pada satu/dua individu, sehingga proses pemenuhan kriteria pada evaluasi kinerja bisa efektif dan efisien.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 25. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Operasional Pelabuhan	110,72%	-	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,59\%}{20} \times 50 \right)$				-	

Pada Tahun 2025, tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Operasional PPN Kejawanan adalah petugas/penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing kelompok serta operator PIPP yang merangkap sebagai pengelola data dan jabatan fungsional AP3T dan P3T.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Operasional Pelabuhan yaitu Monev PIPP dalam rangka mendukung PNBP pasca dan PIT.

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pencapaian indikator “Tingkat Operasional Pelabuhan” yaitu sosialisasi serta pembinaan ke pelabuhan binaan meliputi pembinaan kesyahbandaran, pembinaan serta koordinasi terkait pengelolaan dan operasional PIPP.

IKU 5 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Pelabuhan Perikanan merupakan sarana yang dibangun dan disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang operasional kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan memiliki 2 fungsi yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. Salah satu fungsi pemerintahannya yaitu menyelenggarakan pelayanan bidang Kesyahbandaran, yang spesifik melayani kapal - kapal perikanan yang beroperasi di pelabuhan perikanan.

PPN Kejawanan, sebagai salah satu pelabuhan perikanan kelas Nusantara, turut melaksanakan tugas dan fungsi Kesyahbandaran sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Pada peraturan tersebut disebutkan setidaknya terdapat 18 tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Namun, pada perhitungan indikator kinerja ini, hanya 3 pelayanan Kesyahbandaran yang dijadikan indikator, yang dianggap sebagai pelayanan yang utama dan paling sering dilaksanakan, antara lain Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar, Pelayanan Penerbitan STBLKK, dan Pelayanan Penerbitan SHTI (Lembar Awal).

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025

SK 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab									
IK 5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	-	90	-	-	-	-	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2019 hingga Tahun 2023 belum terdapat indikator kinerja tersebut. Sementara sejak Tahun 2024, IKU tersebut periode pelaporannya bersifat tahunan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
90	-	-	57	-	-

Capaian indikator kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Triwulan I Tahun 2025, IKU terkait Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran sudah dilaksanakan terutama yang terkait langsung dengan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penarikan PNBP Pasca Produksi. Namun demikian, perhitungan realisasi baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2025, dikarenakan target bersifat tahunan.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 28. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran	Realisasi	AARO x CRO	(AARO x CRO) -
----	------------	------------------	-----------	------------	----------------

		(AARO)	Anggaran (RARO)		RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pelayanan Kesyahbandaran	-	10.889.000	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{16,55\%}{20} \times 50 \right)$				50%	

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum ada realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen” dari alokasi anggaran Tahun 2025.

2. Sumber Daya Manusia

Realisasi capaian indikator ini ditunjang oleh sumber daya manusia Kesyahbandaran yang kompeten dan berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan prima. Sumber daya manusia yang tersedia di PPN Kejawanen guna menunjang capaian indikator kinerja ini antara lain; 4 (empat) orang Syahbandar Pelabuhan Perikanan, dan 7 (tujuh) orang Petugas Kesyahbandaran yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja yaitu Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi.

IKU 6 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen (Persen)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan

fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025

SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab								
IK 6		Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	-	-	32	-	-	-	-	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2020 hingga Tahun 2022 belum terdapat indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Sementara di Tahun 2023 dan 2024, IKU tersebut periode pelaporannya bersifat tahunan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
32	-	-	80	-	-

Capaian indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan”. Peningkatan fasilitas untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur dilakukan melalui kegiatan pembangunan prasarana Pelabuhan perikanan.

Kegiatan perencanaan pada tahun 2025 direviu oleh UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal sehingga proses tender memerlukan waktu yang lebih lama. Langkah yang akan dilakukan antara lain koordinasi terkait perencanaan ke UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 31. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pelabuhan perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/ pengembangan fasilitasnya	-	56.400.000.000	11.212.313	-	- 11.212.313
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$				-0,02%	

$= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{29,20\%}{20} \times 50 \right)$	49,95%

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp11.212.313,00 atau 0,02% dari total anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi -0,02% dan nilai efisiensi sebesar 49,95%.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan adalah KPA, PPK, Pokja ULP dan Tim Teknis PTP yang semuanya dengan jabatan fungsional, sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah sangat efisien.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja tersebut adalah PPN Kejawanan telah memiliki dokumen pendukung rencana pengembangan Kawasan berupa: Masterplan, AMDAL, AMDAL LALIN, KKRL, KKKPRL dan Dukungan pemerintah Dalerah (Provinsi Jawa Barat dan Kota Cirebon) untuk pengembangan kawasan Pelabuhan perikanan.

IKU 7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan yang dioperasikan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan diukur berdasarkan skor pada aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di *update* berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab										
IK 7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	-	95,55	30,10	30,10	88,60	294,35	-	-

a. Target dan Realisasi

Pengukuran capaian kinerja Indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 88,60 atau 295,35% dari target Triwulan I Tahun 2025.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Perbandingan dengan tahun sebelumnya, indikator kinerja ini mengalami penurunan dari sebesar 6,95. Hal tersebut dikarenakan adanya peralihan aplikasi SELARASKAN menjadi versi 2 sehingga masih diperlukan penyesuaian dalam proses pengisian.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
30,10	88,60	294,35	30,10	85,77	284,95

Capaian indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” dibandingkan dengan UPT Pelabuhan Perikanan Pusat terdekat, yaitu PPN Pekalongan,

nilai PPN Kejawanen berada diatas PPN Pekalongan yaitu sebesar 88,60 sedangkan PPN Pekalongan memperoleh nilai sebesar 85,77.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian iku ini dilaksanakan melalui mekanisme penginputan pelaksanaan program dan kegiatan tata kelola lingkungan ke dalam aplikasi SELARASKAN yang merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan di cantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

Nilai pengendalian lingkungan di PPN Kejawanen didukung dengan telah terlaksananya program pengendalian lingkungan di PPN Kejawanen sehingga memudahkan dalam penginputan dikarenakan sebagian besar program pada aplikasi telah dilaksanakan di PPN Kejawanen.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 34. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	294,35%	-	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$				-	

$= 50\% + \left(\frac{193,51\%}{20} \times 50 \right)$	
---	--

Pada Tahun 2025, tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan adalah tim yang terdiri dari Kepala Pelabuhan sebagai penasihat, wakil manajemen lingkungan, pengawasan dan pengendalian, analisa dan pencegahan dampak, rehabilitasi dan pemulihan dampak, pengendali dokumen dan 6 (enam) orang pelaksana sesuai dengan surat penugasan dari Kepala PPN Kejawanan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja antara lain :

1. Pelaksanaan K5 di Pelabuhan Perikanan
2. Pelaksanaan tata kelola lingkungan / RKL-RPL di pelabuhan perikanan

3. 1. 4. Sasaran Kegiatan 4 - Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

IKU 8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

Salah satu tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan, utamanya terkait tupoksi kesyahbandaran, PPN Kejawanan bertanggung jawab untuk memastikan setiap kapal perikanan yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, terutama pada aspek kelaikan kapal perikanan. Sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama, penerbitan dokumen kapal perikanan, dalam hal ini Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) orang pegawai yang telah dikukuhkan menjadi Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan dokumen kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri KP No. 33 Tahun 2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan, pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan.

Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja “Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan” Triwulan I Tahun 2025

SK 4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
IK 8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	-	256	575	520	556	106,92	-	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa produktivitas penerbitan dokumen kapal, khususnya SKKP di PPN Kejawanan, sangat tinggi. Hal ini, tak lepas dari komitmen PPN Kejawanan dalam mengakomodasi dan memberikan pelayanan yang prima terhadap pelaku usaha perikanan tangkap. Selain itu, cakupan wilayah kerja yang luas, yakni kapal - kapal perikanan yang berdomisili di wilayah Karawang, Jawa Barat sampai wilayah Tegal, Jawa Tengah, menjadikan PPN Kejawanan sebagai sentra pelayanan penerbitan SKKP. Apabila dilakukan *breakdown* terhadap data akumulatif pada tabel di atas, maka penerbitan SKKP sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 36. Perhitungan Akumulatif Untuk Realisasi IKU Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2025

NO.	Bulan	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
Tahun 2023 - 2024		505
1.	Januari	19
2.	Februari	19
3.	Maret	13
Triwulan I Tahun 2025		556

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Dapat dilihat dari tabel diatas apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi peningkatan signifikan terkait jumlah sertifikat yang berhasil diterbitkan. Hal ini dipengaruhi tingkat kesadaran pemilik kapal kapal dengan tonase kecil terhadap kepatuhan kelengkapan dokumen meningkat. Selain itu, terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada 30 Desember 2024 tentang penjabaran tata cara dan pedoman Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia. Dalam Surat Edaran tersebut, dijelaskan bahwa dalam permohonan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, dapat dilakukan dengan mekanisme pembaruan sementara (berlaku sampai dengan April 2025), pembaruan yang berlakunya 1 tahun, pembaruan bagi kapal akan melakukan migrasi perizinan ke izin pusat dan permohonan dengan mekanisme reguler

(dengan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu). Sehingga jumlah penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan juga mengalami peningkatan

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2025 di PPN Kejawanen dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanen			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
575	556	96,70	496	461	92,94

Jika dibandingkan jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan izin daerah yang diterbitkan dengan PPN Pekalongan, jumlah sertifikat yang telah diterbitkan di PPN Kejawanen lebih tinggi 3,76%. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh target PPN Kejawanen yang juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan PPN Pekalongan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya kapal perikanan izin daerah yang berada di PPN Kejawanen dan juga pelabuhan pelabuhan binaan, sementara di PPN Pekalongan lebih banyak kapal dengan izin pusat.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian IKU ini dilaksanakan melalui kegiatan mekanisme pembaruan dan reguler (melalui pemeriksaan kelaikan kapal perikanan) berdasarkan permohonan dari pengguna jasa. Pelayanan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sepenuhnya dilaksanakan di aplikasi SICEFI melalui tautan kapal.kkp.go.id. Khusus untuk kapal izin daerah, disposisi penugasan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan dilakukan oleh Koordinator, yang dalam hal ini adalah Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, dan proses verifikasi hasil pemeriksaan kelaikan kapal perikanan serta penandatanganan SKKP dilakukan di PPN Kejawanen oleh PPKKP dan Kepala PPN Kejawanen. Sebanyak 51 dokumen SKKP untuk kapal perikanan izin daerah telah diterbitkan selama periode Triwulan I 2025, jumlah ini mengalami penurunan 25% dari SKKP yang terbit pada Triwulan I tahun 2024 yang berjumlah 68 dokumen. Hal ini dikarenakan

banyaknya kapal dengan izin daerah yang melakukan migrasi menjadi izin pusat di tahun 2024.

Analisa Kuantitatif :

Capaian IKU ini dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini :

Target (T) = 200 (dokumen) (penjumlahan antara capaian 2023+2024 dengan target Triwulan I 2025)

Capaian (C) = 256 (dokumen) (penjumlahan antara capaian 2023+2024 dengan capaian Triwulan I 2025)

persentase = $C/T \times 100\%$

= $556/575 \times 100\%$

= 96,6%

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 38. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pemeriksaan kelaikan kapal perikanan	96,70%	-	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{276,25\%}{20} \times 50 \right)$				-	

Pada Tahun 2025, tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, didukung oleh 10 (sepuluh) orang petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal perikanan yang juga merangkap jabatan fungsional sebagai Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T) dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T), sehingga pemanfaatan SDM menjadi efisien. Namun, di sisi lain, pemanfaatan SDM ini juga menjadi bahan evaluasi tersendiri karena berpotensi pelaksanaan tugas menjadi tidak fokus yang mungkin dapat menghambat proses pelayanan penerbitan SKKP.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Faktor Penghambat :

Meskipun capaian telah melampaui target IKU, namun demikian terdapat penurunan dari periode tahun sebelumnya. hal - hal yang mempengaruhi antara lain :

1. Jumlah SDM PPKKP yang memadai, yakni telah mengalami penambahan pasca dikukuhkannya 2 (dua) orang PPKKP pada Maret 2024 sehingga saat ini terdapat 10 PPKKP.
2. Diberlakukannya kebijakan penerbitan SKKP sesuai Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 Tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja Bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia yaitu melalui mekanisme Pembaruan (baik Pembaruan yang 1 tahun maupun Pembaruan sementara) sangat membantu dalam penerbitan SKKP di masa kurangnya dukungan anggaran ini. Berdasarkan data penerbitan SKKP pada Triwulan I, diketahui bahwa sejumlah 16 dokumen (30%) SKKP yang telah terbit melalui mekanisme pembaruan.
3. Permohonan dan penerbitan SKKP melalui aplikasi SICEFI memudahkan pemohon mengajukan perpanjangan SKKP dimana saja dan kapan saja. Hal ini menjadi faktor yang mendukung dalam penerbitan SKKP melalui mekanisme Pembaruan. Namun, untuk SKKP yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan penerbitan melalui mekanisme Pembaruan sehingga diwajibkan dilakukan pemeriksaan ke kapal, faktor anggaran masih menjadi kendala.

Faktor Pendukung :

Terpenuhinya target IKU didukung oleh beberapa hal di bawah ini :

1. Pada 2025, banyak kapal izin daerah (di pelabuhan binaan) yang melakukan migrasi perizinan ke izin pusat, sehingga terhitung sebagai penerbitan SKKP untuk kapal izin pusat dan permohonan penerbitan SKKP tersebut tidak melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Hal ini

berdampak pada menurunnya jumlah penerbitan SKKP yang telah diterbitkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

2. Kurangnya dukungan anggaran imbas dari efisiensi dalam pelaksanaan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan sangat berpengaruh terhadap mobilitas dan produktivitas Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKKP) dalam menerbitkan SKKP pada 2025.

Program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja yaitu Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan berdasarkan permohonan melalui aplikasi SICEFI.

IKU 9 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut yaitu melalui pengendalian usaha sub sektor penangkapan ikan dan usaha subsektor pengangkutan ikan, khususnya tata kelola Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan Kapal Perikanan agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya ikan. Kapal Perikanan sebagai sarana produksi memiliki dua elemen, yakni elemen fisik dan elemen personel. Untuk elemen fisik, Kapal Perikanan harus memenuhi aspek laik laut, laik tangkap, dan laik simpan. Pemenuhan aspek kelaikan elemen fisik kapal perikanan dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan kegiatan operasional Kapal Perikanan.

Khusus untuk elemen personel, Kapal Perikanan harus memenuhi aspek kelaikan pengawakan kapal perikanan, baik dari segi kesejahteraan, kompetensi, disiplin, maupun penempatan/susunan jabatan Awak Kapal Perikanan di Kapal Perikanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan keselamatan pelayaran, perlindungan kerja bagi Awak Kapal Perikanan, serta keberhasilan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

Pelaksanaan perlindungan kerja bagi Awak Kapal Perikanan merupakan hal penting dan krusial dalam operasional kapal perikanan. Komitmen terhadap penegakan HAM Perikanan menjadi perhatian tersendiri bagi PPN Kejawanan. Melalui penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan aspek perlindungan awak kapal perikanan dapat lebih terjamin. Adapun kompetensi tersebut diperlukan dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, keselamatan, keamanan dan keberhasilan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, serta keamanan pangan dan jaminan mutu ikan hasil tangkapan.

Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. Tujuan

implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.

Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut:

- Nilai $\leq 0,25$ kategori “Kurang”;
- Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori “Cukup”;
- Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori “Baik”;
- Nilai $> 0,75$ s.d. $1,00$ kategori “Sangat Baik”.

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” Triwulan I Tahun 2025

SK 6		Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
IK 9		Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,26	-	-	-	-	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara semester, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2020 hingga Tahun 2024 belum terdapat indikator kinerja Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan Triwulan I Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
0,26	-	-	0,26	-	-

Capaian indikator kinerja “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat realisasi.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 41. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Sosialisasi persyaratan pengawakan kapal perikanan	-	-	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{45,31\%}{20} \times 50 \right)$				-	

Pada Tahun 2025, tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menunjang terlaksananya indikator Peningkatan Pengetahuan, Kompetensi, dan Perlindungan Nelayan/ Awak Kapal Perikanan di PPN Kejawanan antara lain; 4 (empat) orang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan 7 (tujuh) orang Petugas Kesyahbandaran yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pada Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Faktor penghambat :

1. Lemahnya penegakan peraturan di pelabuhan perikanan, tidak hanya di PPN Kejawanan, namun juga di seluruh pelabuhan perikanan. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial kultural ekonomi awak kapal perikanan yang menyebabkan keengganan untuk mengikuti pelatihan dan memiliki Buku Pelaut.
2. Dari sisi ekonomi, Pemilik kapal perikanan yang tidak terlalu mementingkan sertifikasi namun kemampuan bekerja awak kapal yang berdasarkan pengalaman dan kebiasaan, menyebabkan awak kapal enggan untuk mengikuti pelatihan sertifikasi dan memiliki Buku Pelaut.
3. Belum tersedianya aplikasi untuk memproses Buku Pelaut bagi awak kapal perikanan.

Faktor Pendukung :

Indikator kinerja ini didukung oleh program/ kegiatan yaitu sosialisasi persyaratan pengawakan kapal perikanan. Meskipun banyak dari awak kapal perikanan yang belum memiliki Buku Pelaut maupun sertifikat kompetensi, namun PPN Kejawanan tetap berusaha menegakkan aspek perlindungan awak kapal perikanan melalui pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang berdasarkan salah satunya dari kepesertaan awak kapal perikanan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Terbukti dari seluruh awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal perikanan di PPN Kejawanan, seluruhnya telah memiliki dokumen PKL. Hal ini dapat terlaksana antara lain dikarenakan faktor - faktor sebagai berikut :

1. Komitmen yang tinggi dari unsur pimpinan di PPN Kejawanan, khususnya Syahbandar di PPN Kejawanan yang berwenang dalam hal keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan dalam mendukung perlindungan HAM perikanan, salah satunya melalui pemeriksaan dan pengesahan PKL.
2. Kesadaran yang mulai tumbuh dari sisi pelaku usaha dan awak kapal perikanan akan pentingnya perlindungan bagi awak kapal selama bekerja di atas kapal. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang intensif dari PPN Kejawanan kepada masyarakat pemangku kepentingan.

3. 1. 5. Sasaran Kegiatan 5 - Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

IKU 10 - Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni “Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Kejawanan” yang merupakan Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Tim Internal PPN Kejawanan yang ditunjuk oleh Kepala PPN Kejawanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tahapan yang dilakukan :

- Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit kerja yang akan dinilai;
- Pemantauan terhadap saran perbaikan dari hasil evaluasi;
- Penilaian terhadap dokumen yang disajikan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta pengujian implementasi pembangunan zona integritas;
- Pleno penilaian oleh Tim Penilaian Internal (TPI) untuk menetapkan nilai akhir sebagai dasar memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM;
- Pemantauan sebelum penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN);
- Pendampingan saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 42. Capaian Indikator Kinerja “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2023	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	75,5	-	-	-	-	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Realisasi Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Triwulan I Tahun 2025 belum ada dikarenakan belum dilaksanakan dan rencana Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas PPN Kejawanan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
75,5	-	-	75,5	-	-

Capaian indikator kinerja “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan dan kegagalan dokumen WBK ditentukan oleh pemenuhan dokumen pendukung WBK yang dihitung dari perbandingan jumlah dokumen WBK yang dipenuhi terhadap dokumen pendukung WBK yang dipersyaratkan.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 44. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas	-	25.000.000	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				0%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,54\%}{20} \times 50 \right)$				50%	

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum ada realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” dari alokasi anggaran Tahun 2025.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang melaksanakan tugas terlaksananya capaian indikator kinerja ini masuk dalam Tim WBK berdasarkan Surat Penugasan dari Kepala Pelabuhan. Jumlah SDM sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang yang terdiri dari Kepala Pelabuhan (Penanggungjawab), Ketua, Sekretaris, serta Koordinator dan Anggota Pokja per masing-masing area. Penggunaan SDM sudah efisien karena semua pegawai yang melaksanakan tugas pemenuhan dokumen WBK melakukan rangkap pekerjaan diluar tupoksi. Selain itu, pengumpulan dokumen ZI WBK dilakukan melalui link *google drive* sehingga mendukung efisiensi dalam pengumpulan dokumen yang harus dipenuhi.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen Pelaksanaan rencana aksi melalui Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas.

IKU 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 45. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
IK 11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	100	100	85	85	100	117,65	-	-

a. Target dan Realisasi

Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I 2025 adalah 100% atau 117,65% dari target triwulan I Tahun 2025, dimana periode Oktober - Desember 2024 rekomendasi kepada PPN Kejawanan telah tuntas (100%) ditindaklanjuti.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:
Pada tahun 2019-2022, tidak terdapat IKM terkait Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKM dimaksud merupakan IKM baru pada Tahun 2023. Realisasi pada Triwulan I Tahun 2023 dan Tahun 2024 mencapai 100%.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
85	100	117,65	85	100	117,65

Jika dibandingkan dengan capaian penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan di PPN Pekalongan, persentase capaiannya sama dengan PPN Kejawanan sebesar 100%.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Berdasarkan rekapitulasi rekomendasi terhadap laporan hasil pengawasan periode Oktober - Desember 2024 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, rekomendasi kepada PPN Kejawanan telah tuntas (100%) ditindaklanjuti sehingga IKU persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Kejawanan pada triwulan I sebesar 100%.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 47. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Kegiatan perjalanan	117,65%	82.840.000	-	97.458.824	97.458.824

dalam rangka pelaporan					
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARoi \times CROi) - RARoi)}{\sum_{i=1}^n (AARoi)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$					117,65%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{39,33\%}{20} \times 50 \right)$					344,12%

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum ada realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen” dari alokasi anggaran Tahun 2025.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” pada Triwulan I Tahun 2025, didukung oleh tim pengelolaan keuangan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan untuk tercapainya IKM tersebut yang merupakan mandatory dari IKU Inspektorat Jenderal adalah kegiatan perjalanan dalam rangka pelaporan.

IKU 12 - Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen (Nilai)

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP.

Tabel 48. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
IK 12		Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	-	-	n/a	n/a	88	-	-	-	-	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Pada tahun 2020, 2023 dan 2024, tidak terdapat IKM terkait Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Sementara di Tahun 2021 dan 2022, IKM tersebut periode pelaporannya bersifat tahunan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
88	-	-	88	-	-

Capaian indikator kinerja “Nilai PM SAKIP” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Hambatan yang dihadapi adalah belum adanya pengumpulan data secara rutin dan tepat waktu sehingga menghambat proses penyusunan Laporan Kinerja.

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu melakukan pemantauan secara berkala untuk periode selanjutnya.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 50. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-	109.000.000	7.531.490	-	- 7.531.490
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-6,91%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{6,55\%}{20} \times 50 \right)$				32,73%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp7.531.490,00 atau 6,91% dari alokasi anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi -6,91% dan nilai efisiensi sebesar 32,73%.

2. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2025, SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini tergabung dalam Tim Pengelola Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang terdiri dari 6 (enam) orang anggota dengan rincian Kepala Subbagian Umum dan perwakilan dari masing-masing tim kerja.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang capaian indikator kinerja “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” yaitu Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

IKU 13 - Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesional ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Tabel 51. Capaian Indikator Kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
IK 13		Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara semester, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

IKM IP ASN periode pelaporannya bersifat semesteran.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
87	-	-	87	-	-

Capaian indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, hambatan yang dihadapi yaitu pegawai yang mengikuti bimtek dan sosialisasi belum aktif melaporkan hasil kegiatan bimtek/diklat/sosialisasi yang diikuti ke bagian kepegawaian. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah reminder kepada seluruh pegawai terkait info pendaftaran bimtek/diklat/sosialisasi serta pengumpulan sertifikat bimtek/diklat/sosialisasi dan mengunggah data dukung pada aplikasi MyASN BKN.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 53. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Manajemen SDM	-	25.000.000	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{14,18\%}{20} \times 50 \right)$				50%	

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum ada realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” dari alokasi anggaran Tahun 2025.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan didukung oleh 63 (enam puluh tiga) orang ASN. Agar capaian IP ASN maksimal, masing – masing pegawai telah diarahkan mengikuti berbagai macam pelatihan sesuai dengan jenis jabatan memenuhi kriteria penilaian dimensi kompetensi selain itu diadakan beberapa kali kegiatan pembinaan pegawai dan monitoring bulanan SKP pegawai untuk menjaga nilai kinerja serta tingkat kedisiplinan pegawai.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja “IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” pada Tahun 2025 yaitu monitoring dan evaluasi kinerja serta penerapan disiplin pegawai. Selain itu, pegawai dihimbau untuk mengikuti kegiatan Bimtek/Seminar/Workshop secara luring maupun daring.

IKU 14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ unit kerja. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Tabel 54. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
IK 14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	76	76	100	131,58	-	-

a. Target dan Realisasi

Capaian IKM Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I 2025 adalah 100% atau 131,58% dari target triwulan I Tahun 2025.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2020 hingga Tahun 2024 belum terdapat indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
76	100	131,58	76	100	131,58

Capaian indikator kinerja “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan memiliki capaian yang sama sebesar 100%.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dimulai dari pelaksanaan tender, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan pekerjaan. Selain itu, jika dimungkinkan melakukan upaya percepatan pengadaan jasa melalui penyedia serta dilakukan pemantauan dan percepatan PBJ.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 56. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	131,58%	1.498.055.000	-	1.971.125.000	1.971.125.000

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	131,58%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{16,18\%}{20} \times 50 \right)$	378,95%

Belum terdapat realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan didukung oleh 1 (satu) orang pejabat fungsional Pengelola PBJ.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, mengelola kontrak penyedia barang/jasa pemerintah, dan melakukan proses barang/jasa pemerintah secara e-purchasing.

IKU 15 - Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Indikator kinerja Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di (nama satker) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);

- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Tabel 57. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2020 belum terdapat indikator kinerja Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Sementara di Tahun 2021-2024, IKM tersebut periode pelaporannya bersifat tahunan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen Triwulan I Tahun 2025 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanen			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
81	-	-	81	-	-

Perbandingan dengan satker lain belum dapat dilakukan karena pengukuran bersifat tahunan.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Catatan Laporan BMN. Selain itu juga telah dilakukan penetapan status penggunaan sebanyak 6 NUP. Namun saat ini, masih terdapat kendala untuk melacak keberadaan aset BMN yang ditemukan. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Inspektorat dan KPKNL terkait aset ex-Departemen Pertanian.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 59. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Kegiatan Laporan Keuangan dan BMN	-	2.060.000	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				0%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$				50%	

$= 50\% + \left(\frac{13,05\%}{20} \times 50 \right)$	
--	--

Belum terdapat realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 1 (satu) orang Pengelola BMN.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yaitu pelaksanaan kegiatan laporan keuangan dan BMN yang merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKM tersebut.

IKU 16 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi

Tabel 60. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara semester, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

IKM Nilai IKPA periode pelaporannya bersifat semesteran.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I Tahun 2025 di PPN Kejawanen dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanen			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
92	-	-	92	-	-

Capaian indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)” untuk PPN Kejawanen dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pengukuran dan pelaporan indikator kinerja ini dilakukan setiap bulannya dengan mengacu kepada realisasi 13 (tiga belas) komponen yang terdapat pada monev PA pada aplikasi OM-SPAN. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini berhubungan dengan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi Penyampaian SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Pengembalian/Kesalahan SPM, dan Perencanaan Kas.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA yaitu melakukan revisi halaman III sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan revolving UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian output dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi output sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 62. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Perkantoran	-	12.875.765.000	4.356.989.425	-	- 4.356.989.425
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-33,84%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{2,76\%}{20} \times 50 \right)$				-34,60%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp4.356.989.425,00 atau 33,84% dari alokasi anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi -33,84% dan nilai efisiensi sebesar -34,60%.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, didukung 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Pengelola Monev, 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN Mahir, serta 2 (dua) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA yaitu melakukan revisi halaman III sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan revolving UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian output dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi output sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

IKU 17 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

NKPA didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi dengan sesuai bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Tabel 63. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan”
Triwulan I Tahun 2025

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	71,5	-	-	-	-	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2020 hingga triwulan III Tahun 2024 belum terdapat indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. IKM tersebut baru muncul pada triwulan IV Tahun 2024.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
71,5	-	-	71,5	-	-

Perbandingan dengan satker lain belum dapat dilakukan karena pengukuran bersifat tahunan.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Faktor pendukung tercapainya target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yaitu adanya peningkatan nilai penyerapan anggaran, konsistensi, capaian realisasi output, efisiensi dan nilai efisiensi.

Faktor penghambat pencapaian NKPA yaitu efisiensi dan nilai efisiensi dengan perbandingan capaian output dengan penyerapan anggaran. Rencana tindak lanjut dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan cara meningkatkan nilai capaian output setiap komponen realisasi output.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 65. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	-	134.000.000	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				0%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{5,26\%}{20} \times 50 \right)$				50%	

Belum terdapat realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 2 (dua) orang Pengelola Keuangan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yakni pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKM tersebut.

IKU 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 66. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2024

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
IK 18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra PPN Kejawanan	
TW I Tahun 2020	TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I Th. 2025	Realisasi TW I Th. 2025	% Realisasi thd Target TW I Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	-	90,81	88,5	88,5	94,79	107,11	-	-

a. Target dan Realisasi

Realisasi capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 94,79 atau 107,11% dari target.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Pada tahun 2020-2022, tidak terdapat IKM terkait Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKM dimaksud merupakan IKM baru pada Triwulan IV Tahun 2023. Realisasi IKM tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian triwulan I Tahun 2024.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Pada triwulan I Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
88,5	94,79	107,11	88,5	97,38	110,03

Jika dibandingkan dengan PPN Pekalongan, realisasi capaian Nilai SKM PPN Pekalongan lebih tinggi dengan selisih persentase sebesar 2,92%.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Aplikasi sudah dibuat semudah mungkin, namun sebagian besar responden dalam pengisiannya perlu pendampingan oleh petugas, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kembali terkait prosedur pengisian pada aplikasi.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 68. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada para pengguna jasa mengenai jenis layanan yang tersedia serta ketentuan tarif yang berlaku	107,11%	-	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{4,88\%}{20} \times 50 \right)$				-	

Pada Tahun 2025, tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 2 (dua) orang Pranata Komputer.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan yang dapat mendukung IKM tersebut yakni sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada para pengguna jasa mengenai jenis layanan yang tersedia serta ketentuan tarif yang berlaku.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp74.398.980.000,00 yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :

Tabel 69. Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2025

KODE	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	59.521.371.000
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	10.889.000
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.866.720.000
TOTAL		Rp74.398.980.000,-

Dari pagu anggaran tersebut, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2024 dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program kegiatannya telah menargetkan sebesar Rp74.398.980.000,- dengan realisasi capaian anggaran sebesar Rp4.439.975.154,- atau 5,97% dari jumlah pagu Tahun 2025.

Tabel 70. Realisasi Keuangan PPN Kejawanan Triwulan I Tahun 2025

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT		PAGU/TARGET	REALISASI	%
1.	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan		59.521.371.000	73.314.239	0,12
		999.999	Output Cadangan	2.425.445.000	-	-
		ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun (Rekomendasi Kebijakan)	50.000.000	-	-
		BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (Lembaga)	695.926.000	62.101.926	8,92
		RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I (Unit)	56.350.000.000	11.212.313	0,02
2.	2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan		10.889.000	-	-
		QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	10.889.000	-	-
5.	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		14.866.720.000	4.366.660.915	29,37
		CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	858.055.000	-	-
		EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	25.000.000	-	-
		EBA.963	Layanan Data dan Informasi (Layanan)	15.000.000	2.140.000	14,27
		EBA.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	12.875.765.000	4.356.989.425	33,84
		EBB.951	Layanan Sarana Internal (Unit)	640.000.000	-	-
		EBB.971	Layanan Prasarana Internal (Unit)	100.000.000	-	-
		EBC.954	Layanan Manajemen SDM (Layanan)	25.000.000	-	-
		EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Layanan)	134.000.000	-	-
		EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Layanan)	109.000.000	7.531.490	6,91
		EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)	84.900.000	-	-

BAB IV. PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dengan dukungan anggaran Rp74.398.980.000,- yang terealisasi sebesar Rp4.439.975.154,- atau 5,97% dari total pagu Tahun 2025. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 115,25%. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerja pada Gambar 4).



Gambar 4. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Triwulan I Tahun 2025

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh nilai target Tahun 2025 yang mencapai angka 100% atau lebih adalah semua indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja sebagai berikut :

1. IK1 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Rp. Juta)
2. IK2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Ton)
3. IK4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)
4. IK7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)
5. IK8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
6. IK11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)
7. IK14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)
8. IK18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)

Untuk 10 (sepuluh) Indikator Kinerja target yang ditetapkan menggunakan metode perhitungan targetnya adalah semesteran atau tahunan sehingga capaian/realisasi indikator tersebut diperoleh pada semester atau akhir tahun, adapun indikator tersebut antara lain :

9. IK3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
10. IK5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
11. IK6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
12. IK9 – Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
13. IK10 – Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
14. IK12 – Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
15. IK13 – Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)
16. IK15 – Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
17. IK16 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
18. IK17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome).

4. 2. Saran

Dengan tercapainya semua target IKU dan IKM pada Triwulan I Tahun 2025 diharapkan agar tetap dilakukan optimalisasi usaha-usaha berupa inovasi kegiatan-kegiatan baru maupun peningkatan kreativitas kegiatan-kegiatan yang ada agar capaian di triwulan berikutnya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil kinerja PPN Kejawanan secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja PPN Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 masih belum sempurna. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan pada triwulan berikutnya yaitu membuat memo dari Kepala Pelabuhan agar seluruh pegawai mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring.

Semoga Laporan Kinerja PPN Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja PPN Kejawanan Triwulan I Tahun 2025 dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja PPN Kejawanan di triwulan selanjutnya.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN _____

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yusuf Fathanah**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 April 2025

PIHAK KEDUA
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala PPN Kejawanan



Yusuf Fathanah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. juta)	6.548,82
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat	2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	5.500
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab	3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	100
		4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	87
		5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	90
		6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	32
		7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	30,10
		8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	575
		9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	75,5
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	85
		12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	88
		13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	87
		14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	76
		15. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	81
		16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	92
		17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	71,5
		18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	88,5

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	59.521.371.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	10.889.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.866.720.000
Total Anggaran PPN Kejawanan Tahun 2025		74.398.980.000

Jakarta, 15 April 2025

PIHAK KEDUA
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala PPN Kejawanan


Yusuf Fathanab



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

JALAN PELABUHAN PERIKANAN NO.1 CIREBON 45113

TELEPON (0231) 210084

LAMAN www.kkp.go.id SUREL ppn_kejawanan@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
Nomor : B.12/KPA-PPNK/KP.110/I/2025**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.34/MEN-KP/KU.611/2022 tentang Perubahan Ketiga Puluh Tujuh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-032.03.2.622482/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN TAHUN ANGGARAN 2025
- PERTAMA** : Menunjuk pegawai yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dan 3 (tiga) lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) PPN Kejawanan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Tim Penyusun Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) PPN Kejawanan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA KEJAWANAN



SARWONO, A.Pi

NIP. 19750508 199803 1 004

LAMPIRAN

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawatanan Nomor:
B.12/KPA-PPNK/KP.110/I/2025 Tentang
Penunjukan Tim Penyusunan Laporan
Kinerja Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawatanan Tahun Anggaran 2025

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Mohamad Yusuf Santoso, A.Md, S.Pi	Ketua
2.	Sari Puspita, S.Psi	Sekretaris
3.	Ana Sholihah Nugraheni, A.Md	Anggota
4.	Mutia Rahayu, S.Pi	Anggota
5.	Zulfan Fahmi Geva Aqviansyah, A.Md	Anggota
6.	Shandra Dewi Adresanty, S.S.T.Pi	Anggota

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA KEJAWATANAN



SARWONO, A.Pi
NIP. 19750508 199803 1 004

TAHUN 2025

[illegible]

[illegible]

		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Sosialisasi dan penyebaran informasi kepada para pengguna jasa mengenai jenis layanan yang tersedia serta ketentuan tarif yang berlaku	-	4	Laporan			1			1			1			1
--	--	----	--	--	---	---	---------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---

Cirebon, 15 April 2025
Kepala PPN Kejawanan



YUSUF FATHANAH